

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku :

Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Alder and John and Peter English, *Constitutional and Administrative Law*, London :Macmillan, 1989.

H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, Lisan Ul Haq, Singapura, 1998.

Jerome A. Barron and C. Thomas S., *Constitutional Law*, St. Paul Menn-West Publishing Co., 1986.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

_____, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta 2005.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Clarendon Press – Oxford, 1989.

Mohammad Mahfud MD, “*Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*”.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

_____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2001.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2010.

Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta : Jogja Great Publisher, 2009.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soimin dan Sulardi, *Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

C. Daftar Bacaan :

- Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 Maret 2006.
- BambangSutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010.
- Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta : PT Kompas media Nusantara, 2009.
- H. Acmad Surkati, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, dan Thailand)* ,Jurnal Equality, volume 11 Nomor 1 Februari 2006.
- Hendri Budiyanto, Skripsi : *“Implikasi Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Phpu.D-Vi/2008 Tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan)”*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Janedjri M Gaffar, Makalah : *Kekuasaan Kehakiman*, Harian Seputar Indonesia, 19 Februari 2008.
- Jimly Assiddiqie, Makalah : *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, disampaikan di Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011, hal.289. Lihat juga Pasal 7B dan 24 C UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* , Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2007.
- Yodi Martono Wahyunandi, *Kompetensi Pengadilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Media Komunikasi Mahkamah Agung RI, Edisi September 2013.

Yosaphat Bambang Suhendarto, Tesis : *Kekuasaan Kehakima Pasca Amandemen UUD 1945*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi>